



Jurnal Ilmiah

BONGAYA

(Manajemen & Akuntansi)

No. XVIII : Oktober 2015 / ISSN : 1907 - 5480



Daftar Isi

Prakata	i
Daftar Isi	ii
Efektivitas Anggaran Belanja Barang Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Ansir Launtu	(1-19)
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Divisi Redaksi Pt Media Fajar Koran. Bustam	(20-35)
Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility (Csr)</i> Pada Laporan Tahunan Di Indonesia Dahniyar Daud	(36-46)
Tantangan Organisasi Bisnis Dalam Menghadapi Mea 2015 Di Sulawesi Selatan Hernita Sahban	(47-58)
MEMBANGUN SEMANGAT BERWIRAUSAHA DI KOTA MAKASSAR Hj Haslina	(59-70)
Pengaruh Struktur Audit Dan Konflik Peran Terhadap Kinerja Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Makassar Ishak	(71-95)
Analisis Daya Saing Sektor Pariwisata Kota Makassar Mohammad Ramli Faud	(96-115)
Analisis Penerapan <i>Balanced Scorecard</i> Seagai Alat Pengukuran Kinerja Pada Pt. Semen Bosowa Nuramal	(116-130)
SDM UNGGULAN MENUJU PENGEMBANGAN PENDIDIKAN Patta Rapanna	(131-142)
Pengaruh Personal Selling Dan Advertising Terhadap Intensitas Pembelian Produk Susu Indomilk Studi Pada Mall Panakukang Makassar Salma Abdullah	(143-164)
Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Komitmen Organisasi Studi Pada Kantor Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan Hasbiyadi	(165-178)

TANTANGAN ORGANISASI BISNIS DALAM MENGHADAPI MEA 2015 DI SULAWESI SELATAN

Hernita Sahban

(Dosen Sekolah tinggi Lasharan Jaya, Makassar)

Abstrak. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tantangan organisasi bisnis dalam menghadapi MEA 2015 di Sulawesi Selatan . Berdasarkan jenis penelitiannya kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *fenomenologi* . Sumber data dalam penelitian ini meliputi: 1) Sumber Data Primer, 2) Sumber Data Sekunder. Instrumen penelitian ini merupakan peneliti sendiri, yang dimana peneliti sebagai instrumen untuk mendapatkan data yang akurat dibekali dengan bermacam-macam metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang Indonesia untuk dapat bersaing dalam MEA 2015 cukup besar, saat ini Indonesia merupakan peringkat 16 di dunia untuk besarnya skala ekonomi. Besarnya skala ekonomi juga didukung oleh proporsi penduduk usia produktif dan pertumbuhan kelas menengah yang besar

Kata Kunci: *Kewirausahaan, Pemikiran Kewirausahaan Berbasis Pada Aktivitas Ekonomi dan Kompetensi*

PENDAHULUAN

Tentunya kita masih ingat krisis moneter yang pernah menimpah Indonesia pada rentang waktu antara tahun 1997 hingga 1998. Akibatnya, banyak perbankan yang harus di tutup paksa, selain itu beberapa perusahaan-perusahaan besar harus gulung tikar dikarenakan tidak mampu bertahan. Hal yang menarik kala itu, disaat perusahaan besar memutuskan untuk gulung tikar namun Usaha Kecil Menengah tetap bertahan seakan krisis moneter yang terjadi tidak memberikan efek yang berarti terhadap aktifitas usahanya.

Peristiwa itu tentunya memberikan pembelajaran besar bahwa ternyata Usaha Kecil Menengah yang terkadang hanya dipandang sebelah mata dan tidak memberikan kontribusi berarti terhadap perputaran dan pertumbuhan ekonomi jauh lebih awet dan tahan banting ketimbang perusahaan-perusahaan besar. Usaha Kecil Menengah (UKM) selain dikenal tahan banting, juga dikenal memiliki daya serap tenaga kerja yang cukup tinggi dan meretas mampu kemiskinan serta kesenjangan sosial.

Beberapa tahun terakhir ini pemerintah (Kementerian Koperasi dan UKM) sedang giat-giatnya mencoba membuka ruang dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan dan membangun Usaha Kecil Menengah dengan tujuan akan terciptanya 20 juta Usaha Kecil Menengah hingga tahun 2020.

Mengacu pada beberapa Negara-negara maju di dunia, kita ketahui bahwa presentase dunia usaha atau katakanlah pengusahanya berada

diatas rata-rata. Dimana standarisasi dunia yakni minimal dua persen dari jumlah penduduk yang ada. Indonesia sebagai Negara ke empat yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia dari segi presentase dunia usaha atau pengusaha baru sekitar kurang lebih satu persen dari jumlah penduduk sekarang ini. Dalam hal kita tentu sudah sangat jauh tertinggal dengan Negara-negara lain, sebutlah misalnya Singapura dan Malaysia.

Upaya pemerintah mendorong dunia usaha melalui usaha mikro kecil menengah dengan harapan standar presentase tersebut bisa kita capai. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa UKM merupakan cikal bakal tumbuhnya usaha yang besar karena hampir semua usaha besar itu berawal dari UKM.

Sulawesi Selatan (Makassar) sebagai gerbang kawasan timur Indonesia, dibawah kepemimpinan Bapak Syahrul Yasing Limpo mencanangkan sebuah program akan menciptakan 1000 pengusaha muda hingga tahun 2019. Ini tentu sejalan dengan apa yang coba dilakukan oleh pemerintah pusat guna meningkatkan iklim wirausaha yang akan bermuarah pada percepatan pertumbuhan ekonomi.

Dari apa yang coba dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia walhasil mendapat respon positif dari seluruh lapisan masyarakat. Hampir disemua daerah yang ada dipelosok tanah air berlomba-lomba memulai kegiatan usaha kecil menengah.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah bahkan menggelontorkan dana yang cukup besar dalam rangka membantu masyarakat yang hendak memulai usaha atau mereka yang hendak mengembangkan usaha yang sudah ada. Pelaku usaha kecil menengah pun kina sudah mulai berjamuran dimana-mana.

Melihat kondisi masyarakat yang ada, dengan kesadaran penuh akan pentingnya dunia usaha seakan memberikan jawaban kepada kita bahwa standarisasi dunia usaha/pengusaha bisa kita capai bahkan melebihi. Hanya saja ini bukanlah negeri dongeng dimana setiap jalan selalu dimudahkan. Hambatan dan tantangan pastilah ada.

Begitupulah apa yang coba dilakukan pemerintah hari ini. Para pelaku usaha mikro kecil menengah mulai menghadapi beberapa permasalahan. Sepertinya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan atau dengan menggunakan mantra *sim sala bim* “jadi maka jadilah”.

Pertumbuhan dunia usaha yang terbilang pesat rupanya menjadikan persaingan usaha yang kurang baik. Dengan adanya hal tersebut tentu saja akan

memberikan dampak negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Dengan terbukanya peluang dan kesempatan usaha yang besar ini ternyata banyak dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki modal besar. Akibatnya yang kaya tetap menjadi kaya dan yang miskin tetap menjadi miskin dengan kata lain UKM tetap menjadi UKM, harapan untuk bisa menjadi usaha besar sepertinya akan tetap menjadi harapan tanpa pernah akan terwujud.

Tinjauan Pustaka

A. Kewirausahaan

Pada awal abad 20, *entrepreneurship* atau kewirausahaan menjadi satu kajian hangat karena perannya yang penting dalam pembangunan ekonomi. Adalah Schumpeter (1934) yang mengatakan bahwa jika suatu negara memiliki banyak entrepreneur, negara tersebut pertumbuhan ekonominya tinggi, yang akan melahirkan pembangunan ekonomi yang tinggi. Jika suatu negara ingin maju, jumlah entrepreneurnya harus banyak. *Enterprenuership is driving force behind economic growth*. Kirzner mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan bagian penting dalam pembangunan.

Rasionalisasinya adalah jika seseorang memiliki kewirausahaan, dia akan memiliki karakteristik motivasi/mimpi yang tinggi (*need of achievement*), berani mencoba (*risk taker*), *innovative dan independence*. Dengan sifatnya ini, dengan sedikit saja peluang dan kesempatan, dia mampu merubah, menghasilkan sesuatu yang baru, relasi baru, akumulasi modal, baik berupa perbaikan usaha yang sudah ada (*upgrading*) maupun menghasilkan usaha baru. Dengan usaha ini, akan menggerakkan material/bahan baku untuk “berubah bentuk” yang lebih bernilai sehingga akhirnya konsumen mau membelinya. Pada proses ini akan terjadi pertukaran barang dan jasa, baik berupa sumber daya alam, uang, sumber daya sosial, kesempatan maupun sumber daya manusia. Dalam ilmu ekonomi, jika terjadi hal demikian, itu berarti ada pertumbuhan ekonomi, dan jika ada pertumbuhan ekonomi berarti ada pembangunan.

Dalam kasus negara, kita bisa belajar dari Jepang, dimana saat PD II, mereka hancur-hancuran. Namun karena *accident* tersebut, Bangsa Jepang justru lebih hebat dari sebelumnya karena setelah itu, pemerintah Jepang melakukan reformasi di segala bidang dengan dua pilar, yakni pembubaran konglomerasi dan UU anti monopoli. Di sektor pertanian, yang paling awal digarap adalah reformasi lahan pertanian.

Sistem “tuan tanah” yang merupakan salah satu bentuk konglomerasi di bidang pertanian dihapus, dan para “tuan tanah” tersebut dilarang memiliki luas

lahan yang terlalu besar. Tanah tersebut dipetak-petak, dan masing-masing lahan digarap oleh petani pemiliknya sendiri. Kalau sebelumnya seorang tuan tanah memiliki lahan sampai seluas 8000 ha, sekarang petani di Jepang memiliki luas lahan rata-rata 1,5 ha (kecuali petani di pulau Hokkaido). Kebijakan ini telah membawa dampak besar terhadap pembangunan ekonomi di Jepang.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa bangsa Jepang adalah pekerja keras. Rata-rata jam kerja pegawai di Jepang adalah 2450 jam/tahun, sangat tinggi dibandingkan dengan Amerika (1957 jam/tahun), Inggris (1911 jam/tahun), Jerman (1870 jam/tahun), dan Perancis (1680 jam/tahun). Seorang pegawai di Jepang bisa menghasilkan sebuah mobil dalam 9 hari, sedangkan pegawai di negara lain memerlukan 47 hari untuk membuat mobil yang bernilai sama. Seorang pekerja Jepang boleh dikatakan bisa melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh 5-6 orang. Pulang cepat adalah sesuatu yang boleh dikatakan “agak memalukan” di Jepang dan menandakan bahwa pegawai tersebut termasuk “yang tidak dibutuhkan” oleh perusahaan.

Sebagian besar literatur menyebutkan bahwa dengan kerja keras inilah sebenarnya kebangkitan dan kemakmuran Jepang bisa tercapai. Salah satu penyebab kegagalan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu negara karena tidak adanya *entrepreneurship* baik dalam level individu, organisasi dan masyarakat.

Peneliti sebelumnya telah mengatakan, kewirausahaan sangat berperan dalam pembangunan ekonomi (Kirzner, 1973), merupakan *a vital component of productivity and growth*, berperan dalam peningkatan investasi, *new business creation*, memunculkan *job training* dan *home-base business*, meningkatkan *employment growth*, penciptaan *nasional identity & leadership* dan bersama dengan kapasitas manajemen sangat menentukan kesuksesan usaha (*farm performance*) (Priyanto, SH, 2005).

Schumpeter (1934) bahkan menyatakan bahwa *enterprenuership is driving force behind economic growth, formulating new economic combination by (1) developing new products; (2) developing new sources of materials; (3) accumulating capital resources; (4) introducing new products and new production functions; and (5) reorganizing or developing a new industry.*

B. Pemikiran kewirausahaan berbasis pada aktivitas ekonomi

Masa Klasik (Sekitar tahun 1700 hingga tahun 1800an). Cantillon (1755) memperkenalkan konsep kewirausahaan dalam literatur perdagangan, ekonomi dan bisnis. Hasil karyanya (Cantillon, 1755) yakni mendefinisikan

ketidaksesuaian antara persediaan dan permintaan, melegalkan untuk membeli barang dengan harga murah dan menjual dengan harga yang tidak pasti serta mengalokasikan barang pada sistem pasar. Pergerakan ekonomi klasik mengikuti pemikiran Cantillon, yakni adanya penawaran, permintaan dan ekuilibrium.

Masa Neoklasik. Masa ini dimulai pada akhir tahun 1800an. Ditandai dengan adanya munculnya konsep *diminishing marginal utility* untuk menjelaskan kegiatan ekonomi dan membuka cara pandang berbeda dalam menyikapi hubungan antar individu. Hasilnya fenomena pasar dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan budaya. Aktivitas kewirausahaan menjadi unik dan dipandang sebagai masa transisi/ perubahan ilmu pengetahuan, yang mana aktivitas kewirausahaan berusaha mengubah/mentransformasi sumberdaya dari produk menuju layanan/jasa.

Hal ini sulit untuk diprediksi karena kondisi ketidakpastian. Pemikiran ekonomi semakin canggih selama pergerakan neoklasik. Pada masa ini para pengusaha lebih cenderung pada alokasi sumberdaya dari pada mengakumulasi modal (Schumpeter, 1934).

Masa proses pasar Austria (AMP/Austria Market Process). Dari pemikiran pada masa neoklasik bahwa untuk mengetahui fenomena ekonomi (dalam rangka mencari peluang) tidak perlu mencari semua informasi yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Namun, jika ini dilakukan maka merupakan pekerjaan yang tidak praktis. Tentunya dibutuhkan pengetahuan khusus pengusaha untuk mencari peluang dan membuat keputusan dengan tepat. Jika pengusaha tahu bagaimana cara untuk menciptakan barang atau layanan melalui inovasi atau mengetahui cara yang lebih tepat untuk melakukannya, maka keuntungan bisa didapatkan melalui pengetahuan ini, berdasar pada ide-ide neoklasik (Schumpeter, 1934), AMP menjadi bagian kewirausahaan yang menggerakkan sistem berbasis pada pasar.

C. Kompetensi

Miller, Rankin and Neathe dalam Hutapea dan Thoah (2008) menyebutkan bahwa pada awalnya hanya ada 2 jenis definisi kompetensi yang berkembang pesat, yaitu: kompetensi yang didefinisikan sebagai gambaran tentang apa yang harus diketahui atau dilakukan seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Pengertian kompetensi jenis ini dikenal dengan nama kompetensi teknis atau fungsional (*technical/functional competencies*) atau dapat disebut juga dengan istilah *hard skill/hard competency* (kompetensi keras).

Menurut Spencer dan Spencer (1993) bahwa terdapat lima tipe karakteristik kompetensi yang menjadi landasan berperilaku dan berpikir, yaitu: (1) Motif, yaitu sesuatu yang secara konsisten dipikirkan yang menyebabkan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju tindakan tertentu, (2) Sifat, yaitu karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi dan informasi, (3) Konsep diri, yaitu sikap, nilai-nilai atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam setiap situasi, (4) Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik. Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks. Skor pada tes pengetahuan sering gagal memprediksi prestasi kerja karena gagal mengukur pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang sebenarnya dipergunakan dalam pekerjaan, (5) Keterampilan, yaitu kemampuan mengerjakan tugas fisik atau kemampuan mental tertentu. Keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual.

Kompetensi merupakan dimensi perilaku yang berada di belakang kinerja kompeten. Dinamakan sebagai kompetensi perilaku karena untuk menjelaskan perannya dengan baik. Sejalan dengan itu, Armstrong dan Baron (1998) melihat bahwa apabila perilaku didefinisikan sebagai kompetensi maka dapat diklasifikasi sebagai: 1) Memahami apa yang perlu dilakukan dalam bentuk alasan: alasan kritis, kapabilitas strategis, dan pengetahuan bisnis, 2) Membuat pekerjaan dilakukan melalui dorongan prestasi, pendekatan proaktif, percaya diri, kontrol, fleksibilitas, berkepentingan dengan efektivitas, persuasi dan pengaruh, 3) Membawa serta orang dengan motivasi, keterampilan antarpribadi, kepentingan dengan hasil, persuasi, dan pengaruh.

Akumulasi modal manusia yang telah lama dianggap sebagai faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Hasil yang diperoleh dalam set awal Regresi Oleh karena itu agak mengecewakan: Ketika seseorang menjalankan spesifikasi tersirat Cobb-Douglas dalam Jess Benhabib, Mark M. Spiegel (1994) fungsi produksi standar yang meliputi modal manusia sebagai faktor, akumulasi modal manusia yang gagal masuk secara signifikan dalam penentuan pertumbuhan ekonomi, dan bahkan masuk dengan perkiraan titik negatif.

Kompetensi emosional dianggap penting untuk interaksi sosial karena emosi melayani komunikatif dan fungsi sosial, menyampaikan informasi tentang pikiran orang dan niat dan mengkoordinasikan pertemuan sosial (misalnya, Keltner & Haidt, 2001 dalam Paulo N. Lopes, Marc A. Brackett, John B. Nezlek, Astrid Schütz, Ina Sellin dan Peter Salovey, 2004).

Metode Penelitian

Penelitian ini menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia, pada penelitian ini dibuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998), jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi

PEMBAHASAN

Sulawesi Selatan juga menunjukkan keagresifannya pada forum-forum ekonomi. Dalam rapat koordinasi bersama 18 atase perdagangan Indonesia di Makassar, 8-9 Maret 2010, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengharapkan berbagai komoditas yang dimiliki Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi lumbung nasional saja, tapi juga dapat menjangkau perdagangan internasional. Atase perdagangan dan perwakilan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) diminta dapat mengoptimalkan fungsinya menjembatani perdagangan luar negeri.

“Sulawesi Selatan siap menerima permintaan dari atase perdagangan dan memasok kebutuhan negara-negara yang membutuhkan komoditas yang kita miliki”, kata gubernur. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan Amar Kadir selama ini ekspor Sulawesi Selatan hanya terfokus pada negara-negara di Benua Amerika dan Asia. Padahal, sumbangan nilai ekspor dari negara di Timur Tengah dan Afrika terhadap nilai ekspor nasional cukup besar.

Ia meyakini kerjasama ini akan menarik investor untuk mendirikan industri pengolahan komoditas sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Koordinasi yang pertama digelar di Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari presentasi peluang investasi Gubernur Sulawesi Selatan di depan 40 dubes asing untuk Indonesia di Jakarta 14 Oktober 2009. Keterbukaan Sulawesi Selatan juga dinyatakan pada forum International Enterprise Singapore (IES) untuk memenuhi kebutuhan dasar Singapura. "Kita memiliki sumber daya alam yang banyak, namun masih membutuhkan investasi pengembangan infrastruktur memadai, teknologi dan sumber daya manusia yang cukup," ujarnya saat menjamu International Enterprise Singapore (IES).

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sulawesi Selatan menawarkan sinergitas antara sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Selatan dengan investasi, teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki Singapura sambil menjanjikan rekomendasi dan jaminan terhadap setiap investasi yang masuk.

Menurut dia, berbagai komoditas yang dimiliki Sulawesi Selatan membutuhkan sentuhan pengusaha untuk membuat pasar komoditas semakin bernilai tambah.

Organisasi pengusaha di Singapura yang kegiatannya adalah memediasi investor yang berminat berinvestasi di Indonesia ini menunjukkan ketertarikannya pada agribisnis, pengolahan makanan, terutama jalur transportasi pada proses masuk dan keluar barang dari dan keluar Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan dan Singapura melalui IES menandatangani kerja sama ekspor sejumlah komoditas untuk diekspor langsung ke Singapura. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu'mang mengatakan dengan kerja sama ini, ekspor komoditas Sulawesi Selatan ke Singapura tidak perlu lagi melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Selain memerlukan biaya tinggi, jalur ekspor melalui Surabaya membuat kualitas komoditas ekspor menjadi buruk karena tersimpan lama di pelabuhan. Pemerintah Singapura juga menawarkan kerja sama dengan industri pengolahan cokelat, kopi, dan perikanan dengan mengharapkan pasokan bahan baku secara rutin dari Sulawesi Selatan. Kerja sama ini dilakukan karena pemerintahnya menilai, Sulawesi Selatan merupakan penghasil komoditas agro terbesar di Indonesia.

Apa yang dilakukan Sulawesi Selatan selama ini sedikit banyak cukup menjawab harapan yang diungkapkan Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar pada KTI Expo dan Forum Oktober 2010. Ia meminta Sulawesi Selatan mengubah visinya sebagai titik penting di wilayah ASEAN bahkan Asia Pasifik dan bukan lagi hanya menjadi pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia. Menurut dia, langkah strategi mengubah visi tersebut akan memberi kesempatan KTI secara keseluruhan bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di kawasan Asia Pasifik.

Jakarta, katanya, sudah sulit memenuhi visi tersebut karena secara geografis lokasinya sebagai akhir dari tujuan. "Jika melihat peta Asia, lagi-lagi Ibu Kota Sulawesi Selatan ada di tengah-tengah," ujarnya. Pada berbagai kesempatan Sulawesi Selatan harus dapat memanfaatkan berbagai forum untuk mempresentasikan posisi strategisnya dan bukan hanya mengharapkan pemerataan pembangunan dengan kawasan barat tapi juga mensubsidinya.

Ia juga meminta Sulawesi Selatan mengarahkan investasi untuk memperoleh nilai tambah, bukan hanya mengeksploitasi sumber daya alam. Ia menilai, pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia khususnya Sulawesi Selatan membutuhkan keseriusan dan komitmen pemerintah pusat untuk menyelesaikan satu per satu persoalan pada industri dan komoditas. "Kita jangan terpaku dengan "masterplan" yang ada kita harus mengandalkan daya dan kapasitas daerah yang kemudian didukung pusat tidak sebaliknya," ujarnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah tidak selalu melihat regulasi sebagai hambatan, namun melihat kemungkinan dari sisi bisnisnya. "Sulawesi Selatan punya kapasitas bisnis itu tapi memang harus didorong terus," katanya.

Setelah menjadi tuan rumah bagi kemajuan ekonomi dan investasi di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Selatan dipercaya menjadi tuan rumah dari pertemuan Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia, Filipina-East ASEAN Growth Area pada November 2010.

Isu krisis pangan dunia yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan ini dimanfaatkan Sulawesi Selatan dengan menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pasokan pangan dunia. Kesuksesan Sulawesi Selatan di bidang agribisnis lagi-lagi menjadi alasan The First BIMP-EAGA Agricultural Minister Meeting tersebut yang diselenggarakan di Makassar selain karena Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, merupakan Chief Local Government Unit dari seluruh provinsi di BIMP-EAGA.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan nilai ekspor negara-negara yang tergabung dalam BIMP-EAGA mencapai lebih dari 50 miliar dolar AS. Kondisi ini menunjukkan peran penting negara-negara forum sebagai pemain utama dunia dalam banyak komoditas ekspor dan dalam pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara. Dalam sepuluh tahun terakhir negara-negara tersebut telah menjadi produsen sebagian besar komoditas pangan dan agrikultur. Berdasarkan potensi yang dimiliki tersebut, para pemimpin negara dalam BIMP-EAGA mengadopsi konsep yang dikenal sebagai lumbung pangan atau "food basket" untuk wilayah Asia Tenggara dan Asia.

Sektor agrikultur dan perikanan memiliki peranan signifikan memberikan kontribusi pada pembangunan saat ini dan pada masa depan kerja sama antara negara BIMP-EAGA untuk mengentaskan kemiskinan dan pencapaian target MDG's. Selain potensi komoditas, negara-negara forum juga memiliki potensi lokasi strategis dan akses untuk pasar ASEAN dan untuk wilayah utara Asia, Asia Tenggara dan Timur Tengah. Indonesia sendiri, katanya, sudah sangat siap dengan konsep lumbung pangan yang dibahas dalam pertemuan BIMP-EAGA.

Bagi Indonesia, pembentukan MEA 2015 akan memberikan beberapa tantangan yang tidak hanya bersifat internal di dalam negeri tetapi terlebih lagi persaingan dengan sesama negara ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti China dan India. Persaingan yang ketat ini akan berdampak pada harga yang kompetitif pula, bukan hanya komoditi/produk/jasa unggulan industry besar (UB), tetapi juga sektor UMKM karena kesamaan karakteristik produk. Menyadari peran UMKM sebagai kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan cukup dominan dalam perekonomian, maka pencapaian kesuksesan MEA 2015 mendatang juga akan dipengaruhi oleh kesiapan UMKM.

Peluang Indonesia untuk dapat bersaing dalam MEA 2015 sebenarnya cukup besar, saat ini Indonesia merupakan peringkat 16 di dunia untuk besarnya skala ekonomi. Besarnya skala ekonomi juga didukung oleh proporsi penduduk usia produktif dan pertumbuhan kelas menengah yang besar.

Prospek ekonomi Indonesia yang positif juga didukung oleh perbaikan peringkat investasi Indonesia oleh lembaga pemeringkat dunia serta masuknya Indonesia sebagai peringkat empat prospective destinations berdasarkan UNCTAD *World Investment report*. Masih kuatnya fundamental perekonomian Indonesia dapat dilihat ketika banyak negara yang “tumbang” diterpa pelemahan perekonomian global, perekonomian Indonesia masih dapat terjaga untuk tumbuh positif. Menurut Sadoko Isono dan Heriyadi (2001 : 14), Pembinaan adalah proses mengajarkan keahlian dan memberikan pengetahuan yang perlu serta sikap supaya mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Pembinaan juga merupakan salah satu keharusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Peranan pemerintah terutama pemerintahan Kota Makassar tentu menjadi penting terutama untuk mengantarkan mereka agar mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya dalam memanfaatkan MEA pada tahun 2015. Beberapa upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk memberdayakan UMKM adalah:

1. Meningkatkan Kualitas dan Standar Produk

Guna dapat memanfaatkan peluang dan potensi pasar di kawasan ASEAN dan pasar global, maka produk yang dihasilkan UKM haruslah memenuhi kualitas dan standar yang sesuai dengan kesepakatan ASEAN dan negara tujuan. Dalam kerangka itu, maka UKM harus mulai difasilitasi dengan kebutuhan kualitas dan standar produk yang dipersyaratkan oleh pasar ASEAN maupun di luar ASEAN. Peranan dukungan teknologi untuk peningkatan kualitas dan produktivitas serta introduksi desain kepada para pelaku UKM yang ingin memanfaatkan pasar ASEAN perlu segera dilakukan.

2. Meningkatkan Akses Finansial

Isu finansial dalam pengembangan bisnis UKM sangatlah klasik. Selama ini, belum banyak UKM yang bisa memanfaatkan skema pembiayaan yang diberikan oleh perbankan. Hasil survey *Regional Development Institute* (REDI, 2002) menyebutkan bahwa ada 3 gap yang dihadapi berkaitan dengan akses finansial bagi UKM, (1) aspek formalitas, karena banyak UKM yang tidak memiliki legal status; (2) aspek skala usaha, dimana sering sekali skema kredit yang disiapkan perbankan tidak sejalan dengan skala usaha UKM; dan (3) aspek informasi, dimana perbankan tidak tahu UKM mana yang harus dibiayai, sementara itu UKM juga tidak tahu skema pembiayaan apa yang tersedia di perbankan. Oleh karena itu, maka ketiga gap ini harus diatasi, diantaranya dengan

peningkatan kemampuan bagi SDM yang dimiliki UKM, perbankan, serta pendamping UKM. Pada sisi lain, harus juga diberikan informasi yang luas tentang skema-skema pembiayaan yang dimiliki perbankan.

3. Meningkatkan Kualitas SDM dan Jiwa Kewirausahaan UMKM dan Koperasi

Secara umum kualitas SDM pelaku UKM di Indonesia masih rendah. Terlebih lagi spirit kewirausahaannya. Kalau mengacu pada data UKM pada tahun 2008, tingkat kewirausahaan di Indonesia hanya 0,25% dan pada tahun 2011 diperkirakan sebesar 0,273%. Memang hal ini sangat jauh ketinggalan dengan negara-negara lain di dunia, termasuk di Asia dan ASEAN. Sebagaimana di Singapura, tingkat kewirausahaan di Singapura lebih dari 7% demikian juga di USA, tingkat kewirausahaannya sudah mencapai 11,9%.

Oleh karena itu, untuk memperkuat kualitas dan kewirausahaan UKM di Indonesia, maka diperlukan adanya pendidikan dan latihan keterampilan, manajemen, dan diklat teknis lainnya yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan kewirausahaan juga perlu ditingkatkan.

Pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional pada tanggal 2 Februari 2011 lalu harus ditindaklanjuti dengan langkah kongkrit, seperti penyusunan grand strategy pengembangan kewirausahaan dan pelaksanaan dilapangan yang dilakukan dalam kaitannya dan bertanggung jawab. Hal penting yang juga perlu diperhatikan adalah perlunya dukungan modal awal terutama bagi wirausaha pemula.

4. Memperkuat dan Meningkatkan Akses dan Transfer Teknologi Bagi UKM Untuk Pengembangan UKM Inovatif

Akses dan transfer teknologi untuk UKM masih merupakan tantangan yang dihadapi di Indonesia. Peranan inkubator, lembaga riset, dan kerjasama antara lembaga riset dan perguruan tinggi serta dunia usaha untuk alih teknologi perlu digalakkan. Kerjasama atau kemitraan antara perusahaan besar, baik dari dalam dan luar negeri dengan UKM harus didorong untuk alih teknologi dari perusahaan besar kepada UKM. Praktek seperti ini sudah banyak berjalan di beberapa Negara maju, seperti USA, Jerman, Inggris, Korea, Jepang dan Taiwan. Model-model pengembangan klaster juga harus dikembangkan, karena melalui model tersebut akan terjadi alih teknologi kepada dan antar UKM.

Kesimpulan

Bagi Indonesia, pembentukan MEA 2015 akan memberikan beberapa tantangan yang tidak hanya bersifat internal di dalam negeri tetapi terlebih lagi persaingan dengan sesama negara ASEAN dan negara lain di luar ASEAN seperti China dan India. Persaingan yang ketat ini akan berdampak pada harga yang kompetitif pula, bukan hanya komoditi/produk/jasa unggulan industry besar (UB), tetapi juga sektor UMKM karena kesamaan karakteristik produk. Menyadari peran UMKM sebagai kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan cukup dominan dalam perekonomian, maka pencapaian kesuksesan MEA 2015 mendatang juga akan dipengaruhi oleh kesiapan UMKM.

References

- Amstrong, M. & Baron, A. 1998. *Performance Management*. New York: The New Realities, Institute of Personnel and Development.
- Hutapea, Thoha. 2008. *Kompetensi Plus*. Jakarta: PT GramediaPustakaUtama.
- Jess Benhabib, Mark M. Spiegel (1994), “*The role of human capital in economic development Evidence from aggregate cross-country data*”, *Journal of Monetary Economics* 34 (1994).
- Kirzner, I. (1973). “*The Entrepreneur*”, *Competition and Entrepreneurship*. Chicago: University of Chicago Press, Chapter 2, pp. 30-87.
- Paulo N. Lopes, Marc A. Brackett, John B. Nezlek, Astrid Schütz, Ina Sellin dan Peter Salovey (2004), “*Emotional Intelligence and Social Interaction*”, *PSPB*, Vol. 30 No. 8, August 2004.
- Priyanto, Sony Heru, (2002), “*Pengembangan Kewirausahaan dan Kapasitas Manajemen pada UKM Pertanian*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dian Ekonomi*. Vol. III No. 3, 401-427.
- Schumpeter, Joseph A. (1934), “*In theory of Economic Development: an Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and The Business Cycle*”, Oxford University Press, New York.
- Spencer, M. Lyle and Spencer, M. Signe. 1993. *Competence at Work: Models for Superior Performance*. New York, USA: John Wiley & Son, Inc.